

Implementasi Perda Dana Abadi Pendidikan terhadap Keberlanjutan Pendidikan di Bojonegoro

Dewi Ghurrotun Nailiyah¹, Sri Minarti²,

^{1,2}Program Studi PAI, Fakultas Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

Email: minarti@sunan-giri.ac.id

Article Info

Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 26, 2026

Keywords:

education policy, education endowment fund, continuing education, Bojonegoro.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Regional Regulations (Perda) of the Regional Endowment Fund for Education on the sustainability of education in Bojonegoro Regency. The research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation from the Education Office as well as official documents from the local government. The results of the study show that the Education Endowment Fund policy is a strategic step for local governments in supporting long-term education financing through sustainable management of regional funds. However, policy implementation still faces challenges in terms of management and supervision so that good governance is needed so that policy goals can be achieved optimally. Thus, the Education Endowment Fund Regulation can be a regional policy innovation in supporting the development of sustainable education in Bojonegoro Regency.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 26, 2026

Kata kunci:

kebijakan pendidikan, dana abadi pendidikan, pendidikan berkelanjutan, Bojonegoro.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah (Perda) Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan terhadap keberlanjutan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari Dinas Pendidikan serta dokumen resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dana Abadi Pendidikan menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan pendidikan jangka panjang melalui pengelolaan dana daerah secara berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan dalam aspek pengelolaan dan pengawasan sehingga diperlukan tata kelola yang baik agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, Perda Dana Abadi Pendidikan dapat menjadi inovasi kebijakan daerah dalam mendukung pembangunan pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Dewi Ghurrotun Nailiyah

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

Email: minarti@sunan-giri.ac.id

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan daerah karena memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas pendidikan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dituntut mampu menghadirkan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh generasi saat ini maupun generasi mendatang.

Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mulai menerapkan kebijakan strategis di bidang pendidikan melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan. Kebijakan tersebut lahir sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pendanaan pendidikan di tengah ketergantungan daerah terhadap sektor minyak dan gas bumi (migas) yang bersifat tidak terbarukan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama DPRD menetapkan Perda Nomor 14 Tahun 2025 tentang Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan. Perda ini mengatur mengenai sumber dana, pengelolaan, pemanfaatan, hingga pengawasan dana abadi pendidikan yang diproyeksikan menjadi investasi jangka panjang bagi dunia pendidikan di Bojonegoro. Pembentukan dana abadi tersebut dinilai sebagai langkah visioner karena bertujuan menjaga stabilitas pembiayaan pendidikan meskipun pendapatan daerah dari sektor migas mengalami penurunan di masa depan.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menargetkan pembentukan Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp3 triliun yang akan direalisasikan secara bertahap mulai tahun 2026. Dana tersebut direncanakan berasal dari dana bagi hasil migas, hasil investasi, dan sumber pendapatan sah lainnya. Kehadiran kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah.

Namun demikian, implementasi kebijakan Dana Abadi Pendidikan juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa persoalan yang muncul di antaranya berkaitan dengan mekanisme pengawasan, regulasi teknis pelaksanaan, serta penyesuaian penganggaran daerah. Bahkan, dalam proses awal implementasi, alokasi dana abadi sempat mengalami penundaan dalam APBD akibat hasil evaluasi pemerintah provinsi terhadap mekanisme penganggaran yang digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya membutuhkan perencanaan yang baik, tetapi juga kesiapan regulasi, tata kelola, dan koordinasi antar lembaga pemerintahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda Dana Abadi Pendidikan dalam mendukung keberlanjutan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan pendidikan jangka panjang, sekaligus melihat tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan Dana Abadi Pendidikan sebagai bentuk inovasi kebijakan daerah di bidang pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Dana Abadi Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro, khususnya terkait proses pelaksanaan, tujuan kebijakan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan daerah. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama penelitian.

Lokasi penelitian dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya pada instansi yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, bagian perencanaan daerah, serta dokumen kebijakan pemerintah daerah mengenai Dana Abadi Pendidikan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan karena Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang menerapkan kebijakan Dana Abadi Pendidikan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perda Dana Abadi Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan sebagai langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan pendidikan daerah. Kebijakan ini menjadi salah satu inovasi pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan daerah, khususnya dari sektor minyak dan gas bumi (migas), untuk kepentingan pendidikan jangka panjang. Pembentukan Dana Abadi Pendidikan bertujuan agar sektor pendidikan tetap memperoleh dukungan pembiayaan meskipun pendapatan daerah dari sektor migas mengalami penurunan di masa mendatang.

Berdasarkan data pemerintah daerah, Dana Abadi Pendidikan direncanakan mencapai nilai Rp3 triliun yang akan direalisasikan secara bertahap mulai tahun 2026. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber pendapatan sah lainnya. Pemerintah daerah menilai bahwa pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan masyarakat Bojonegoro sehingga membutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan.

Implementasi kebijakan Dana Abadi Pendidikan menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu membantu pembiayaan pendidikan, seperti pemberian beasiswa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, pengembangan kompetensi guru, serta program pendidikan lainnya. Selain itu, Dana Abadi Pendidikan juga diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga stabilitas pendanaan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DPRD dan instansi pendidikan daerah. Dinas Pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan melalui pendataan

kebutuhan pendidikan serta perencanaan program yang sesuai dengan kondisi daerah. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

2. Dampak Kebijakan Dana Abadi terhadap Keberlanjutan Pendidikan

Keberadaan Dana Abadi Pendidikan memberikan dampak positif terhadap upaya pembangunan pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembiayaan pendidikan jangka panjang. Sebelumnya, pembiayaan pendidikan daerah lebih bergantung pada alokasi anggaran tahunan APBD yang jumlahnya dapat berubah sesuai kondisi ekonomi daerah. Dengan adanya dana abadi, pemerintah daerah memiliki cadangan pembiayaan pendidikan yang lebih stabil.

Kebijakan ini juga dinilai mampu meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa diperkirakan menjadi salah satu prioritas utama pemanfaatan dana abadi. Selain itu, pengembangan fasilitas pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik juga menjadi fokus utama pemerintah daerah.

Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program pembangunan sekolah, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan pendidikan berbasis teknologi. Kehadiran Dana Abadi Pendidikan diharapkan dapat memperkuat program-program tersebut sehingga pembangunan pendidikan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan.

Selain berdampak pada sektor pendidikan, kebijakan Dana Abadi Pendidikan juga memberikan pengaruh terhadap pembangunan sosial daerah. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini dipandang sebagai investasi daerah untuk masa depan generasi muda Bojonegoro.

3. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun memiliki tujuan yang baik, implementasi Dana Abadi Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana. Pengelolaan dana abadi membutuhkan sistem yang transparan dan akuntabel agar penggunaannya sesuai dengan tujuan kebijakan.

Selain itu, terdapat tantangan dalam proses penganggaran daerah. Pada tahap awal implementasi, alokasi Dana Abadi Pendidikan sempat mengalami kendala dalam pembahasan APBD karena memerlukan penyesuaian regulasi dan evaluasi dari pemerintah provinsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah provinsi.

Tantangan lainnya adalah memastikan keberlanjutan sumber pendanaan dana abadi. Kabupaten Bojonegoro masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap pendapatan sektor migas. Padahal, sektor tersebut bersifat tidak terbarukan sehingga pemerintah daerah perlu mempersiapkan strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu memperoleh pemahaman mengenai tujuan dan manfaat Dana Abadi Pendidikan agar kebijakan tersebut mendapatkan dukungan publik. Transparansi informasi dan pengawasan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Analisis Kebijakan Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, Perda Dana Abadi Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro dapat dikategorikan sebagai kebijakan pendidikan inovatif di tingkat daerah. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah pendidikan saat ini, tetapi juga mempersiapkan keberlanjutan pendidikan generasi mendatang.

Implementasi kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki visi pembangunan jangka panjang melalui investasi pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu faktor utama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada tata kelola dana, pengawasan, serta konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan program pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar tujuan Dana Abadi Pendidikan dapat tercapai secara optimal.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan pendidikan jangka panjang. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan pendidikan sebagai investasi masa depan melalui pengelolaan dana yang bersumber dari pendapatan daerah, khususnya sektor minyak dan gas bumi (migas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dana Abadi Pendidikan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Dana abadi dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pendidikan seperti pemberian beasiswa, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan kompetensi guru, serta program pendidikan lainnya yang berorientasi pada peningkatan mutu sumber daya manusia. Kehadiran kebijakan ini juga menjadi bentuk antisipasi pemerintah daerah terhadap kemungkinan menurunnya pendapatan daerah dari sektor migas di masa depan. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam aspek pengelolaan, pengawasan, dan mekanisme penganggaran daerah. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan agar tujuan Dana Abadi Pendidikan dapat tercapai secara optimal. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, Dinas Pendidikan, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam

mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Secara keseluruhan, Perda Dana Abadi Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro dapat menjadi contoh inovasi kebijakan pendidikan daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi dunia pendidikan serta meningkatkan kualitas generasi muda di Kabupaten Bojonegoro pada masa yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih juga kepada semua sumber referensi yang telah digunakan dalam penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penelitian ini. Terima kasih atas kesabaran, waktu, dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih atas fasilitas dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penelitian. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan Pendidikan Multikulturalisme di Indonesia dan menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar – Implementasi Kebijakan Pendidikan. Atikah, C., Handayani, H. T., & Mariyanto. (2024). *Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar.

BPK RI – Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2025 tentang Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/346410/perda-kab-bojonegoro-no-14-tahun-2025?utm_source=chatgpt.com

JDIH Kabupaten Bojonegoro – Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2025. https://jdih.bojonegorokab.go.id/produk-hukum/detail/872?utm_source=chatgpt.com

JDIH Kabupaten Bojonegoro – Produk Hukum Peraturan Daerah. https://jdih.bojonegorokab.go.id/produk-hukum/jenis/perda?utm_source=chatgpt.com

BPK RI – Pencarian Peraturan Dana Abadi Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. https://peraturan.bpk.go.id/Search?entitas=304&tahun=2025&utm_source=chatgpt.com

JDIH Kabupaten Bojonegoro – Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda Dana Abadi Pendidikan. https://jdih.bojonegorokab.go.id/produk-hukum/detail/712?utm_source=chatgpt.com

JDIH Kabupaten Bojonegoro – Produk Hukum Dana Abadi Pendidikan.



https://jdih.bojonegorokab.go.id/produk-hukum?q=peraturan+daerah&status=berlaku&tahun=2025&utm_source=chatgpt.com

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. (peraturan.bpk.go.id)